PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI BPKAD KOTA BANDUNG (Studi Kasus Pada Pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung)

Oleh:
Hari Bagja
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: bagjahari@ymail.com

Helena Rizqia, SE.,MM

ABSTRAK

Pada tahun 2011-2015 Pemerintah Kota Bandung masih mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang berarti dimana masih terdapatnya permasalahan dalam kualitas laporan keuangan. Masalah mengenai Opini terhadap LKPD diberikan oleh BPK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Bandung khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kuesioner yang disebar sebanyak 105 kuesioner. Kuesioner yang kembali adalah 100 kuesioner dan dimasukan dalam pengolahan data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modelling (SEM) melalui pendekatan Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS 2.0.

Hasil hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa Pengendalian Internal memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keungan.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan dibuka Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) maka pasar asing atau investor asing bebas melakukan kegiatan usahanya di Negara yang ingin mereka gunakan sebagai tempat melakukan persaingan usahanya, misalnya Negara di Indonesia (Ahmad Faishol, 2016). Oleh karena itu peran Akuntansi Sektor Publik disini sangat berpengaruh dalam membantu membangun perekonomian suatu daerah (Ahmad Faishol, 2016). Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada hakikatnya merupakan pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi dari daerah tersebut. Selain itu, pemberian otonomi daerah juga memberikan keleluasaan kepala daerah untuk mengelola keuangan daerahnya (Ahmad Faishol, 2016).

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum (Ida Ayu Enny Kinarayati dan Ni Made Adi Erawati, 2016). Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Ida Ayu Enny Kinarayati dan Ni Made Adi Erawati, 2016). Organisasi sektor publik yang

sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan (Ida Ayu Enny Kinarayati dan Ni Made Adi Erawati, 2016). Pemerintah merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Ida Ayu Enny Kinarayati dan Ni Made Adi Erawati, 2016). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Ida Ayu Enny Kinarayati dan Ni Made Adi Erawati, 2016).

Keuangan Negara wajib dikelola oleh aparatur negara yang kompeten secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Untuk mencapai hal tersebut maka suatu instansi juga membutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang kuat serta peran dari audit intern untuk mencapai tujuan suatu organisasi (M. Ali Fikri Biana Adha Inapty & RR. Sri Pancawati Martiningsih, 2016). Dengan dukungan sistem pengendalian internal yang kuat tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (M. Ali Fikri Biana Adha Inapty & RR. Sri Pancawati Martiningsih, 2016). Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan peran audit internal tentunya mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan suatu instansi, agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (M. Ali Fikri Biana Adha Inapty & RR. Sri Pancawati Martiningsih, 2016).

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Daniel Kartika Adhi & Yohanes Suhardjo, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dalam Tuti Herawati, Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Tuti Herawati. 2014). Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: Keandalan pelaporan keuangan, Efektifitas dan efisiensi operasi, dan Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Sukrisno Agoes. 2012:100). Tujuan sistem pengendalian internal menurut Waren *et al* dalam Ida Ayu Enny Kinarayati dan Ni Made Adi Erawati salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi (Ida Ayu Enny Kinarayati dan Ni Made Adi Erawati, 2016). Sistem Pengendalian Internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang di terapkan untukmencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku (Diah dan Bestari, 2015). Fenomena yang menggambarkan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) berkaitan dengan penerapan sistem informasi akuntansi di pemda, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2011 ditemukan sebanyak 1.401 kasus kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan, diantaranya disebabkan oleh pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan tidak sesuai ketentuan; entitas terlambat menyerahkan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak

memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai (Silviana. 2014).

Yang lain mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan menangani data untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan melalui penggunaan yang canggih, teknologi atau sistem sederhana atau di antara keduanya (Romney & Steinbart 2012: 26).

Salah satu faktor penentu lainnya yaitu dapat menentukan tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Pemahaman Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual (Ida Ayu Enny Kinarayati dan Ni Made Adi Erawati, 2016). Definisi pemahaman regulasi adalah pemahaman anggota/pegawai mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan, pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan regulasi akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi. Jika pemahaman regulasi atas PP 71 tahun 2010 rendah maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Dasar pemikirannya adalah pemahaman terhadap aturan yang tidak penuh mengindikasikan implementasi aturan cendrung menggunakan insting dibandingkan aturan yang berlaku. Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Fiji (Ida Ayu Enny Kinarayati dan Ni Made Adi Erawati, 2016). Sehingga, tinggi-rendahnya tingkat pemahaman regulasi akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan (Ida Ayu Enny Kinarayati dan Ni Made Adi Erawati, 2016).

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran ini berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah (Ida Ayu Enny Kinarayati dan Ni Made Adi Erawati, 2016).

Dari latar belakang penelitian yang dijelaskan di atas, maka dengan ini penulis tertarik mengambi judul. **"Pengaruh Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di BPKAD Kota Bandung".**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Mengumpulkan data secara empiris dan informasi mengenai Pengaruh Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Manfaat penelitian menurut (Sugiyono, 2013:305), merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian, apabila penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah terjawab dengan akurat. Memenuhi prinsip dasar dalam penelitian yaitu adanya kegunaan dari penelitian ini, maka penulis membagi menjadi dua segi kegunaan yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademis.

Bagi instansi penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan dalam memecahkan masalah yang dialami oleh instansi sektor publik khususnya dalam memecahkan masalah mengenai Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kualitas Laporan Keuangan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti, Hasil penelitian ini dapat memeberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih mengenai Pengaruh Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung dan juga pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Bagi Instansi Pemerintahan, Sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* sehingga inspektorat diharapkan dapat membuat program yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitas. Diaharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah agar lebih dan meningkatkan sistem pengendalian intern dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung.
3. Bagi Pihak Lain, Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk pengembangan serta sumber informasi atau masukan mengenai pentingnya Pengaruh Pengendalian Internal Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengendalian Internal

Menurut Kieso (2014 : 305) " *Internal Control consists of the related and measure adopted within an organization to safeguard its assets, enhance the realibility of its accounting records, increase efficiency of operation, and ensure compliance with laws and regulation".*

Menurut *Commitee Of Sponsoring Organization* (COSO) dalam buku Azhar Susanto (2013 : 95) menyatakan bahwa: "Pengendalian intern meliputi dorongan yang diberikan kepada seseorang atau karyawan bagian tertentu dari organisasi atau organisasi secara keseluruhan agar berjalan sesuai dengan tujuan".

Sedangkan menurut Hery (2013:159) pengendalian intern memiliki arti sebagai berikut : "Seperangkat dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalagunaan menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahan".

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina (2015:5) mengatakan bahwa: "Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum".

Menurut Nurmalia Hasanah (2016:195) sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut: "Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan sistem akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi, yang mencatat transaksi keuangan daerah

sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran lain terkait dengan keuangan daerah".

Menurut Abdul Halim (2014: 94) mengatakan bahwa: "Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset".

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Iman Mulyana (2010 : 96) adalah sebagai beirkut: "Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan."

Menurut Deddi Nordiawan (2012:151) adalah: "Bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas."

Menurut Irham Fahmi (2014:2) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut: "Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) mengatakan: "Semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian internal maka akan semakin tinggi tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah."

Menurut Marshall B. Romney & Paul John Steinbart yang diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwary dkk (2011:37): "*Controler* (pengendalian) bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memproses data yang dibutuhkan untuk mempersiapkanlaporan keuangan dan berbagai macam laporan manajerial, akan tetapi tidak cukup hanya membuat laporan saja. *Controler* harus memahami dengan baik isu-isu bisnis dibalik angka-angka tersebut untuk membantu manajemen menginterpretasikannya dengan tepat. *Controler* juga harus bekerja dengan berbagai manajer untuk mengetahui informasi yang mereka perlukan untuk bekerja secara efektif dan kemudian membuat alat alat untuk menyediakan informasi tersebut".

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggadini (2011: 213): "Pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku".

2.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Pramono Hariadi (2013:131) mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut: "Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, diperlukan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang memadai".

Menurut Abdul Halim (2014:31) mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut: "Akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu, serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan".

Menurut Mahmudi (2010:27) mengemukakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut: "Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari

siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas".

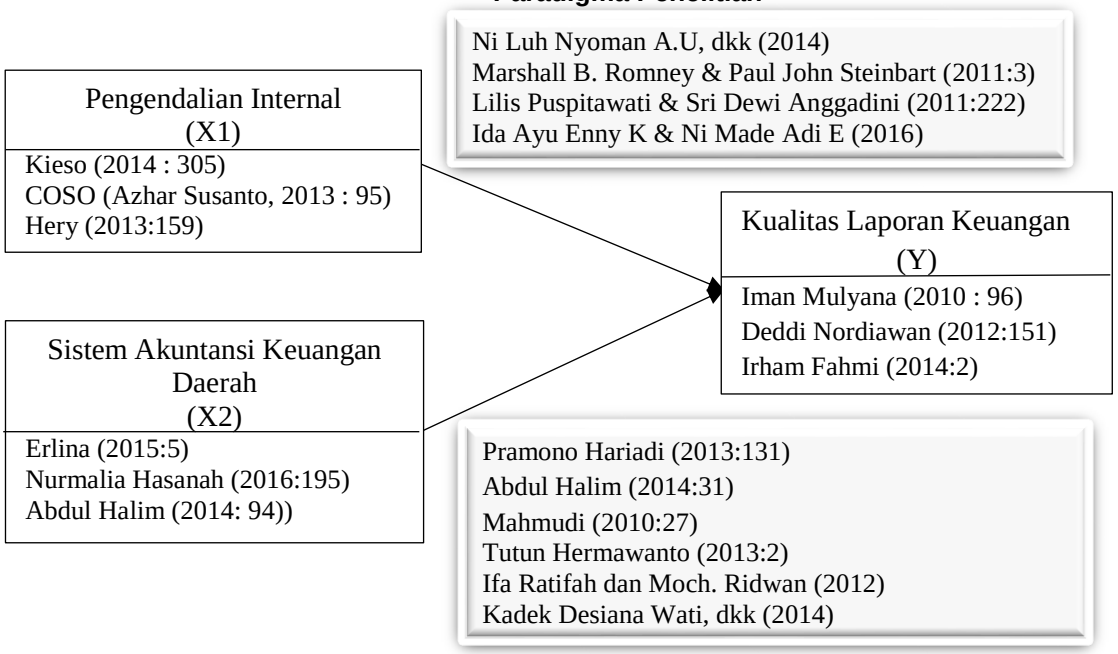
Menurut Tutun Hermawanto (2013:2) mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut: "Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan".

Menurut Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut: "Model regresi variabel SAKD signifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk SAKD sebesar 0,039 (α < 0.05), sehingga dapat disimpulkan variabel SAKD mempunyai pengaruh signifikan terhadap kual0069tas laporan keuangan".

Menurut Kadek Desiana Wati, dkk (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut: "Berdasarkan analisis statistik pada tabel 1 dalam penelitian diperoleh nilai koefisienregresi sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,135. Hal ini berarti system akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan nilai signifikani sistem akuntansi keuangan daerah adalah 0,021 < 0,05. Hal ini berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan paradigma penelitian sebagi berikut :

Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut: "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H_1 = Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_2 = Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Pemecahan masalah pada suatu penelitian memerlukan penyelidikan yang hati-hati, teratur dan terus-menerus, sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data guna mencapai tujuan tertentu.

Metode Penelitian menurut Sugiyono (2014: 2) pada dasarnya merupakan:

"Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Tujuan dan kegunaan penelitian yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signnifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2. Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012:59) operasionalisasi variabel adalah : "Operasionalisasi variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya".

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Variabel dalam konteks penelitian menurut Sugiyono (2014:61) adalah sebagai berikut:

"Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertent yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya"

Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah :

1) Variabel Independen/Bebas

Menurut Sugiyono (2014:61): "Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)". Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Akuntansi.

Pengumpulan informasi mengenai variabel ini berdasarkan kuesioner berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden.

2) Variabel *Intervening*

Menurut Sugiyono (2014:63): "Variabel intervening merupakan variabel penyela/antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen".

3) Variabel Dependen/Terikat

Menurut Sugiyono (2014:61): "Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei.

Menurut Sugiyono (2012:6), metode survei didefinisikan sebagai berikut: “Metode Survei digunakan untuk mendapatkan data dan tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengadarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur”.

3.4 Populasi

Sugiyono (2014:80) mengungkapkan bahwa populasi adalah: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi sasaran populasi dalam penelitian ini berjumlah 126 Pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang ada di Pemerintah Kota Bandung.

3.5 Sampel

Sugiyono (2014:81) mengungkapkan bahwa sampel adalah: “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”

Sedangkan teknik sampling yang diungkapkan oleh Sugiyono (2014:81) adalah: “Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel.”

Dalam penelitian ini, penarikan sampel menggunakan teknik *nonprobability sampling*. *Nonprobability Sampling m*enurut Sugiyono (2014:84) adalah: “*Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.”

Selain itu dalam penarikan sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan kriteria tertentu dalam memilih sampel. Hal ini disebut dengan *sampling purposive*.

Sugiyono (2014:85) mengungkapkan bahwa *Sampling Purposive* adalah: “*Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”

Kriteria yang dipilih oleh penulis dalam menentukan penarikan sampel dalam penelitian ini adalah: 105 Pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Tabel 3.1
Penarikan Sampel

No.	Sub Unit	Jumlah
1.	Bidang Anggaran	14 Orang
2.	Bidang Perbendaharaan	30 Orang
3.	Bidang Akuntansi	22 Orang
4.	Bidang Pemberdayaan Aset	39 Orang
Total		105 Orang

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien.

Menurut V. Wiratna (2015:226) mendefinisikan uji heterokedastisitas sebagai berikut:

"Uji heterokedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas".

Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan metode *scatter plot*, dengan kriteria hasil sebagai berikut :

1. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.2 Uji Multikolineritas

Menurut Ghozali (2013:91) uji multikolinieritas adalah :

"Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)".

Ghozali juga mengatakan adanya multikolinieritas, jika :

a. Jika antar variabel bebas pada korelasi diatas 0,90, maka hal ini merupakan multikolinieritas.
b. Atau multikolinieritas juga dapat dilihat dari VIF, jika VIF < 10 maka tingkat kolinieritasnya masih dapat di toleransi.
c. Nilai *Eigen Value* berjumlah satu atau lebih, jika variabel bebas mendeteksi 0 menunjukkan adanya multikolineritas.

3.6.3 Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar (2011:182) mentakan bahwa :

"Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian".

Pada pengujian autokorelasi digunakan uji *Durbin-Watson* untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilai statistik *Durbin-Watson* (D-W). Uji *Durbin-Waston* digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variable lagi di antara variable bebas. Hipotesis yang akan diuji adalah:

HO: Tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

HA: Ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Menurut Jonathan Sarwono (2012:28) terjadi autokorelasi jika durbin watson sebesar < 1 dan > 3.

3.7 Pengujian Hipotesis

Rancangan pada pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruhnya antara variabel independen yaitu Pengendalian Internal sebagai X_1 dan Sistem Informasi Akuntansi sebagai X_2 terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen (Y), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Uji Parsial (T)
   Uji T dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terkait dengan asumsi variabel bebas yang lain tidak berubah.

keterangan :
t = Nilai uji t
r = Koefisien korelasi *pearson*
r^2 = Koefisien determinasi
n = Jumlah sampel



Gambar 3.1
Uji Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis
(Sumber Sugiyono, 2013:226)

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

- *Ho* diterima jika nilai hitung statistik uji (thitung) berada di daerah penerimaan *Ho,* dimana atau atau nilai sig > α.

- *Ho* ditolak jika nilai hitung statistik uji (thitung) berada di daerah penolakan *Ho,* dimana atau atau nilai sig < α.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.7 Hasil Penelitian.

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner yang disebar kepada 105 Pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung. Dalam variabel Pengendalian Internal terdiri dari 5 item pernyataan, variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari 7 item pernyataan dan variabel Kualitas Laporan Keuangan juga terdiri dari 10 item pernyataan. Selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian dikodekan *(codding)* serta diolah menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap variabel yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan analisis *Structural Equation Modelling (SEM)* menggunakan *Partial Least Square* (PLS) untuk menganalisis pengaruh dari Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah memiliki hubungan Sedang/ cukup dan memiliki arah yang positif yang berarti apabila Pengendalian Internal baik maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah juga akan semakin baik, Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah, dan menunjukkan bahwa jika Pengendalian Internal semakin baik maka akan diikuti dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang baik pula.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu sebesar 15.50 %, yang artinya bahwa Pengendalian Internal terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada 100 Pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggadini (2011: 213) Pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini yaitu: a) keandalan pelaporan keuangan, b)efektifitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku".

Fenomena yang berkaitan dengan variabel x1 ke y dimana pada Pengendalian Internal Badan Pengelolaan Keuangam dan Aset Daerah Kota Bandung menunjukkan masih kurangnya penilaian laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang secara lima tahun berturut-turut Pemerintah Kota Bandung masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yaitu oleh (Ida Ayu Enny Kinarayati dan Ni Made Adi Erawati, 2016) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah menyimpulkan bahwa pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

4.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah memiliki hubungan Sedang/ cukup dan memiliki arah yang positif yang berarti apabila Sistem Akuntansi Keuangan Daerah baik maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah juga akan semakin baik, Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah, dan menunjukkan bahwa jika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah semakin baik maka akan diikuti dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang baik pula.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu sebesar 20.10 %, yang artinya bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada 100 Pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Mahmudi (2010:27) mengemukakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas Fenomena yang berkaitan dengan variabel x1 ke y dimana pada Pengendalian Internal Badan Pengelolaan Keuangam dan Aset Daerah Kota Bandung menunjukkan masih kurangnya penilaian laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang secara lima tahun berturut-turut Pemerintah Kota Bandung masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yaitu oleh Menurut Kadek Desiana Wati, dkk (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagai berikut Berdasarkan analisis statistik pada tabel 1 dalam penelitian diperoleh nilai koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,135. Hal ini berarti sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan nilai signifikani sistem akuntansi keuangan daerah adalah 0,021 < 0,05. Hal ini berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu oleh Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimana Model regresi variabel SAKD signifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk SAKD sebesar 0,039 ($\alpha < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan variabel SAKD mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I hingga bab IV mengenai Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada 100 Pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung, maka dari itu, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, dimana hasil hipotesisnya berada bearada pada daerah penolakan H_a, yang berarti bahwa terdapat hubungan antara Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang menunjukkan hubungan tinggi dan bertanda positif, artinya apabila semakin baik Pengendalian Internal, maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dimana hasil hipotesisnya berada pada daerah penolakan H_a, yang berarti bahwa terdapat hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah menunjukkan hubungan tinggi signifikan dan bertanda positif, artinya apabila Sistem Akuntansi Keuangan Daerah baik, maka akan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran Operasional

a) Permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kota Bandung adalah pendataan aset dan sistem pengendalian internalnya, dalam hal ini contohnya yaitu tidak adanya sertifikat kepemilikan dan aset yang telah dikuasai oleh pihak ketiga, padahal di sisi lain aset ini tercatat sebagai kepemilikan aset Pemkot Bandung dan berada pada indikator Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*). Untuk meningkatkan pengendalian internal yaitu kegiatan pengendalian harus lebih teliti dalam mencatat setiap transaksi, setiap transaksi harus menggunakan bukti transaksi supaya menghindari pencatatan yang tidak akurat, dan perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pencatatan maupun pelaporan bukti transaksi-transaksi penggunaan dana yang dilakukan.

b) Permasalahan yang terjadi adalah masih lemahnya kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah indikator pencatatan dan pengikhtisaran. Untuk meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu dengan diadakan penyesuaian dalam sistem akuntansi keuangan daerah sesuai bidang pengetahuan dan keterampilannya. Sangat diperlukan pegawai yang profesional di bidang akuntansi sektor publik. Selain itu, melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia agar dapat menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan supaya tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Selanjutnya diperlukan pengawasan dan pengendalian yang memadai untuk dapat mengontrol sumber daya manusia dalam bersikap agar dapat menangani kendala dalam integritasi dan komunikasi dalam bertugas demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

2. Saran Akademis

a) Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait Pengaruh Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.

b) Bagi Peneliti Lain Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel

independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Ahmad Faishol. 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.* Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi. Volume I No. 3, Oktober 2016.

COSO. 2013. *Internal Control – Integrated Framework : Executive Summary,* Durham. North Carolina. May 2013.

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hery. 2013. *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi 1)*. Cetakan Pertama. Jakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).

Ida Ayu Dan Ni Made. 2016. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.2. Agustus (2016): 1290-1318.

Irham Fahmi. 2014. *Analisis Laporan Keuangan.* Bandung: Alfabeta.

Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan. 2012. *Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Trikonomika.Volume 11, No. 1.

Kadek Desiana Wati, dkk. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Buleleng*. eJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)

Lilis Puspitawati *dan* Sri Dewi Anggadini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

M. Ali Fikri Biana Adha Inapty dan RR. Sri Pancawati Martiningsih. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan*. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 9 (1), April 2016

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nurmalia Hasanah Dan Achmad Fauzi. 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. 2016. Penerbit In Media.

Pramono Hariadi, dkk. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.

Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9 Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta.

Silviana. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Profita. Volume 6. No. 1. April 2014.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.

Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian.* Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

Sujarweni Wiratna V. 2015. *Sistem Akuntansi*, 1nd ed, Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Sukrisno Agoes. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Salemba Empat: Jakarta.

Tuti Herawati. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.* STAR – Study & Accounting Research. Vol XI, No. 1 – 2014

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Berbasis Akrual.*